

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT****NOMOR: HK.02.02/C/724/2025****TENTANG****PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****DIREKTUR JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penurunan insiden Tuberkulosis (TBC), cakupan penemuan kasus TBC, angka keberhasilan pengobatan, presentase pasien TBC yang memulai pengobatan, dan cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah;
- b. bahwa untuk memenuhi kualitas pemeriksaan terduga TBC dan mendukung eliminasi TBC pada tahun 2030, dibutuhkan bahan medis habis pakai yang dapat mendukung dalam proses penegakan diagnosis TBC bagi terduga melalui mekanisme bantuan pemerintah;
- c.. bahwa agar pelaksanaan pemenuhan bahan medis habis pakai melalui mekanisme bantuan pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran diperlukan petunjuk teknis bantuan pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah dalam rangka Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Penanggulangan Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 794);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah dalam rangka Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi pemberian bantuan.

- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan dalam bentuk bahan medis habis pakai (BMHP).
- KEEMPAT : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikelola dan didistribusikan oleh dinas kesehatan provinsi ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan rencana distribusi yang telah ditetapkan dan kebutuhan program.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2025

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT,



MURTI UTAMI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT  
NOMOR: HK.02.02/C/724/2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS TAHUN 2025

**A. Latar Belakang**

Tuberkulosis (TBC) masih merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di dunia. Menurut Laporan WHO dalam Global TBC Report tahun 2022. Saat ini Indonesia berada di peringkat kedua dunia sebagai penyumbang penderita TBC terbanyak setelah India, dengan estimasi insiden sebesar 1.090.000 kasus atau 301 per 100.000 penduduk dan mortalitas 93.000 atau 34 per 100.000 penduduk (selain TB HIV). Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan insidensi kasus TBC menjadi 65 per 100.000 penduduk pada tahun 2030. Upaya penanggulangan TBC di Indonesia tahun 2020-2024 telah diarahkan untuk mempercepat upaya Indonesia mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030, serta mengakhiri epidemi TBC di tahun 2050. Namun, capaian indikator utama Program TBC tahun 2021 seperti indikator penemuan dan pengobatan pada TBC sensitif obat (SO) maupun TBC resisten obat (RO) masih di bawah target nasional.

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian cakupan penemuan kasus TBC (*treatment coverage*) sebesar 77% (target 90%), angka keberhasilan pengobatan (*treatment success rate*) sebesar 85% (target 90%), dan persentase pasien TBC RO memulai pengobatan sebesar 55% (target 90%). Situasi capaian program TBC tahun 2023 belum memenuhi target yang ditentukan. Meskipun ada beberapa daerah yang sudah mencapai target, tetapi secara nasional masih perlu diperluas lagi untuk beberapa daerah dengan capaian di bawah target. Untuk tahun 2024, capaian sesuai dengan hasil analisis laporan yang sudah diinput dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) dan sudah dilakukan analisis capaian sebesar 856.420 orang dengan terdiagnosis TBC atau 78% dari estimasi target 1.092.000, sehingga masih ada gap capaian sebesar 22%

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pelaksanaan penyediaan BMHP tahun 2025 salah satunya melalui mekanisme dana bantuan pemerintah. Pelaksanaan bantuan pemerintah merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan beberapa perubahannya.

**B. Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah**

1. Menjamin ketersediaan peralatan dan bahan medis habis pakai sebagai kebutuhan deteksi dini dan skrining TBC kepada masyarakat
2. Meningkatkan Cakupan Penemuan Kasus TBC dan Laten TB untuk konfirmasi pemberian Terapi Pencegahan TBC
3. Meningkatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat
4. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit
5. Menurunkan angka kesakitan dan kematian
6. Mendukung Astacita Pemerintah melalui program Quickwins Penuntasan TBC

**C. Sasaran Bantuan Pemerintah**

1. Pemerintah Daerah Provinsi
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan
4. Masyarakat atau kelompok masyarakat berisiko
5. Tersalurnya bantuan penyediaan barang berupa sarana prasarana/ obat, BMHP, dan reagen kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan deteksi dini dan pengobatan di layanan laboratorium/ rumah sakit/puskesmas

**D. Indikator Keberhasilan**

Bantuan pemerintah tersalur 100% (seratus persen) kepada Penerima Manfaat dalam upaya meningkatkan layanan deteksi dini, skrining terduga TBC, penemuan kasus, pengobatan serta keberhasilan pengobatan, dengan Indikator keberhasilan sebagai berikut:

- Cakupan penemuan kasus TBC sebesar 90%

- Angka keberhasilan pengobatan sebesar 90%
- Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan sebesar 95%
- Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah sebesar 72%

**E. Pemberi Bantuan Pemerintah**

Pemberi bantuan ini adalah Kementerian Kesehatan melalui satuan kerja Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit sebagai pemerintah pusat yang diserahkan kepada dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota serta fasilitas pelayanan kesehatan, dan selanjutnya akan digunakan untuk pelaksanaan deteksi dini dan skrining kepada masyarakat terduga TBC.

**F. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah**

Persyaratan penerima bantuan pemerintah:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Dinas Kesehatan Provinsi

**G. Mekanisme dan Kriteria**

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan BMHP kepada Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan target sasaran/target sesuai indikator keberhasilan dan sudah disinkronkan dengan penetapan target oleh Pemerintah Pusat.
2. Pengalokasian BMHP untuk penuntasan TBC diprioritaskan untuk:
  - a. daerah yang telah menyampaikan usulan/proposal berupa kebutuhan dan kesediaan menerima bantuan pemerintah;
  - b. jumlah alokasi bantuan pemerintah dihitung berdasarkan jumlah sasaran yang akan disasar berdasarkan target yang sudah disinkronkan dengan target yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit;
  - c. daerah dengan ketersediaan BMHP *stockout*;
  - d. daerah dengan trend penemuan kasus yang memiliki kecenderungan meningkat;
  - e. daerah dengan jumlah kasus terbanyak dan kapasitas fiskal yang rendah;



- f. daerah yang memiliki ketersediaan peralatan deteksi dini kasus TBC.
3. Usulan kebutuhan yang disampaikan dilakukan verifikasi oleh pengelola program teknis di pusat.
4. BMHP dapat dilakukan realokasi sesuai pemanfaatan dan tingkat ketersediaan.

#### **H. Bentuk Bantuan Pemerintah**

Bantuan diberikan dalam bentuk uang/sarana prasarana barang milik negara (BMN)/obat/BMHP dan reagen penunjang deteksi dini/pengobatan untuk mendukung kegiatan penanggulangan TBC, seperti:

1. sarana prasarana medis dan non medis dalam mendukung program;
2. bantuan sarana prasarana dalam bentuk BMHP yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan orang terduga TBC Sensitif Obat;
3. bantuan sarana prasarana dalam bentuk BMHP yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan orang terduga TBC Resisten Obat;
4. bantuan sarana prasarana dalam bentuk BMHP yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan orang terduga TBC laten.

I. Alokasi Anggaran dan Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Rencana Distribusi BMHP Kartrid TCM BD Max TA 2025

| No | Provisi             | Alokasi<br>BD<br>MAX<br>MDR<br>TB<br>Assay<br>(boks;<br>@boks<br>24 tes) | Alokasi<br>BD MAX<br>STR<br>Reagent<br>(boks;<br>@boks<br>48 tes) | Alokasi<br>BD MAX<br>PCR<br>Cartridge<br>(boks;<br>@boks<br>288 tes) | Harga<br>satuan<br>(Alokasi<br>BD MAX<br>MDR TB<br>Assay<br>(boks;<br>@boks 24<br>tes) | Total Nilai<br>(Alokasi BD MAX<br>MDR TB Assay<br>(boks; @boks 24<br>tes) | Harga<br>satuan<br>(Alokasi<br>BD MAX<br>STR<br>Reagent<br>(boks;<br>@boks 48<br>tes) | Total Nilai<br>(Alokasi BD<br>MAX STR<br>Reagent (boks;<br>@boks 48 tes) | Harga<br>satuan<br>(Alokasi<br>BD MAX<br>PCR<br>Cartridge<br>(boks;<br>@boks 288<br>tes) | Total Nilai<br>(Alokasi BD<br>MAX PCR<br>Cartridge<br>(boks; @boks<br>288 tes) |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Aceh                | 101                                                                      | 51                                                                | 9                                                                    | 5.600.000                                                                              | 565.600.000                                                               | 4.200.000                                                                             | 214.200.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 44.100.000                                                                     |
| 2  | Sumatera Utara      | 94                                                                       | 47                                                                | 8                                                                    | 5.600.000                                                                              | 526.400.000                                                               | 4.200.000                                                                             | 197.400.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 39.200.000                                                                     |
| 3  | Riau                | 111                                                                      | 56                                                                | 9                                                                    | 5.600.000                                                                              | 621.600.000                                                               | 4.200.000                                                                             | 235.200.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 44.100.000                                                                     |
| 4  | Sumatera Selatan    | 156                                                                      | 78                                                                | 13                                                                   | 5.600.000                                                                              | 873.600.000                                                               | 4.200.000                                                                             | 327.600.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 63.700.000                                                                     |
| 5  | Banten              | 170                                                                      | 85                                                                | 14                                                                   | 5.600.000                                                                              | 952.000.000                                                               | 4.200.000                                                                             | 357.000.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 68.600.000                                                                     |
| 6  | DKI Jakarta         | 337                                                                      | 169                                                               | 28                                                                   | 5.600.000                                                                              | 1.887.200.000                                                             | 4.200.000                                                                             | 709.800.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 137.200.000                                                                    |
| 7  | Jawa Barat          | 445                                                                      | 223                                                               | 38                                                                   | 5.600.000                                                                              | 2.492.000.000                                                             | 4.200.000                                                                             | 936.600.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 186.200.000                                                                    |
| 8  | Jawa Tengah         | 267                                                                      | 134                                                               | 22                                                                   | 5.600.000                                                                              | 1.495.200.000                                                             | 4.200.000                                                                             | 562.800.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 107.800.000                                                                    |
| 9  | Jawa Timur          | 123                                                                      | 62                                                                | 10                                                                   | 5.600.000                                                                              | 688.800.000                                                               | 4.200.000                                                                             | 260.400.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 49.000.000                                                                     |
| 10 | Kalimantan Barat    | 87                                                                       | 44                                                                | 7                                                                    | 5.600.000                                                                              | 487.200.000                                                               | 4.200.000                                                                             | 184.800.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 34.300.000                                                                     |
| 11 | Gorontalo           | 88                                                                       | 44                                                                | 8                                                                    | 5.600.000                                                                              | 492.800.000                                                               | 4.200.000                                                                             | 184.800.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 39.200.000                                                                     |
| 12 | Sulawesi Tengah     | 73                                                                       | 37                                                                | 6                                                                    | 5.600.000                                                                              | 408.800.000                                                               | 4.200.000                                                                             | 155.400.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 29.400.000                                                                     |
| 13 | Sulawesi Selatan    | 119                                                                      | 60                                                                | 10                                                                   | 5.600.000                                                                              | 666.400.000                                                               | 4.200.000                                                                             | 252.000.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 49.000.000                                                                     |
| 14 | Bali                | 72                                                                       | 36                                                                | 6                                                                    | 5.600.000                                                                              | 403.200.000                                                               | 4.200.000                                                                             | 151.200.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 29.400.000                                                                     |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 160                                                                      | 80                                                                | 14                                                                   | 5.600.000                                                                              | 896.000.000                                                               | 4.200.000                                                                             | 336.000.000                                                              | 4.900.000                                                                                | 68.600.000                                                                     |
|    | TOTAL               | 2,403                                                                    | 1,206                                                             | 202                                                                  | 5.600.000                                                                              | 13.456.800.000                                                            | 4.200.000                                                                             | 5.065.200.000                                                            | 4.900.000                                                                                | 989.800.000                                                                    |

Rencana Distribusi BMHP Kartrid TCM BD Max TA 2025

| No               | Provinsi                  | Alokasi Rendis Truenat MTB Plus | Alokasi Rendis Truenat MTB RIF | Harga satuan | Total          |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| 1                | Kepulauan Bangka Belitung | 200                             | 40                             | 255.000      | 61.200.000     |
| 2                | Banten                    | 1.400                           | 280                            | 255.000      | 428.400.000    |
| 3                | DKI Jakarta               | 400                             | 80                             | 255.000      | 122.400.000    |
| 4                | Jambi                     | 350                             | 60                             | 255.000      | 104.550.000    |
| 5                | Jawa Barat                | 2.150                           | 420                            | 255.000      | 655.350.000    |
| 6                | Jawa Tengah               | 1.750                           | 340                            | 255.000      | 532.950.000    |
| 7                | Jawa Timur                | 3.050                           | 600                            | 255.000      | 930.750.000    |
| 8                | Kalimantan Selatan        | 1.000                           | 200                            | 255.000      | 306.000.000    |
| 9                | Kalimantan Tengah         | 750                             | 140                            | 255.000      | 226.950.000    |
| 10               | Kalimantan Timur          | 1.350                           | 260                            | 255.000      | 410.550.000    |
| 11               | Kalimantan Utara          | 550                             | 100                            | 255.000      | 165.750.000    |
| 12               | Kepulauan Riau            | 350                             | 60                             | 255.000      | 104.550.000    |
| 13               | Maluku                    | 1.900                           | 380                            | 255.000      | 581.400.000    |
| 14               | Nusa Tenggara Barat       | 350                             | 60                             | 255.000      | 104.550.000    |
| 15               | Nusa Tenggara Timur       | 1.400                           | 280                            | 255.000      | 428.400.000    |
| 16               | Papua                     | 750                             | 140                            | 255.000      | 226.950.000    |
| 17               | Papua Barat Daya          | 150                             | 20                             | 255.000      | 43.350.000     |
| 18               | Papua Pegunungan          | 5.050                           | 1.000                          | 255.000      | 1.542.750.000  |
| 19               | Papua Tengah              | 2.700                           | 540                            | 255.000      | 826.200.000    |
| 20               | Riau                      | 850                             | 160                            | 255.000      | 257.550.000    |
| 21               | Sulawesi Barat            | 200                             | 40                             | 255.000      | 61.200.000     |
| 22               | Sulawesi Selatan          | 2.400                           | 480                            | 255.000      | 734.400.000    |
| 23               | Sulawesi Tengah           | 850                             | 160                            | 255.000      | 257.550.000    |
| 24               | Sumatera Barat            | 450                             | 80                             | 255.000      | 135.150.000    |
| 25               | Sumatera Utara            | 1.400                           | 280                            | 255.000      | 428.400.000    |
| Total Distribusi |                           | 31.750                          | 6.200                          | 255.000      | 9.677.250.000  |
| Buffer Pusat     |                           | 2.594                           | 664                            | 255.000      | 830.790.000    |
| Lain-lain*       |                           | 1.500                           | 300                            | 255.000      | 459.000.000    |
| TOTAL            |                           | 35.844                          | 7.164                          | 255.000      | 10.967.040.000 |

Rencana Distribusi Tuberkulin TA 2025

| No | Provinsi            | Jumlah Distribusi (Vial) | Harga Satuan | Total          |
|----|---------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 1  | ACEH                | 625                      | 780.000      | 487.500.000    |
| 2  | SUMATERA UTARA      | 2.243                    | 780.000      | 1.749.540.000  |
| 3  | SUMATERA BARAT      | 781                      | 780.000      | 609.180.000    |
| 4  | RIAU                | 778                      | 780.000      | 606.840.000    |
| 5  | KEP RIAU            | 386                      | 780.000      | 301.080.000    |
| 6  | JAMBI               | 412                      | 780.000      | 321.360.000    |
| 7  | SUMATERA SELATAN    | 1.178                    | 780.000      | 918.840.000    |
| 8  | BANGKA BELITUNG     | 172                      | 780.000      | 134.160.000    |
| 9  | BENGKULU            | 254                      | 780.000      | 198.120.000    |
| 10 | LAMPUNG             | 1.059                    | 780.000      | 826.020.000    |
| 11 | BANTEN              | 1.590                    | 780.000      | 1.240.200.000  |
| 12 | DKI JAKARTA         | 1.931                    | 780.000      | 1.506.180.000  |
| 13 | JAWA BARAT          | 7.094                    | 780.000      | 5.533.320.000  |
| 14 | JAWA TENGAH         | 3.861                    | 780.000      | 3.011.580.000  |
| 15 | DI YOGYAKARTA       | 321                      | 780.000      | 250.380.000    |
| 16 | JAWA TIMUR          | 4.206                    | 780.000      | 3.280.680.000  |
| 17 | KALIMANTAN BARAT    | 634                      | 780.000      | 494.520.000    |
| 18 | KALIMANTAN TENGAH   | 283                      | 780.000      | 220.740.000    |
| 19 | KALIMANTAN SELATAN  | 501                      | 780.000      | 390.780.000    |
| 20 | KALIMANTAN TIMUR    | 658                      | 780.000      | 513.240.000    |
| 21 | KALIMANTAN UTARA    | 107                      | 780.000      | 83.460.000     |
| 22 | SULAWESI UTARA      | 418                      | 780.000      | 326.040.000    |
| 23 | GORONTALO           | 200                      | 780.000      | 156.000.000    |
| 24 | SULAWESI TENGAH     | 345                      | 780.000      | 269.100.000    |
| 25 | SULAWESI SELATAN    | 1.367                    | 780.000      | 1.066.260.000  |
| 26 | SULAWESI BARAT      | 171                      | 780.000      | 133.380.000    |
| 27 | SULAWESI TENGGARA   | 330                      | 780.000      | 257.400.000    |
| 28 | BALI                | 320                      | 780.000      | 249.600.000    |
| 29 | NUSA TENGGARA BARAT | 647                      | 780.000      | 504.660.000    |
| 30 | NUSA TENGGARA TIMUR | 621                      | 780.000      | 484.380.000    |
| 31 | MALUKU              | 280                      | 780.000      | 218.400.000    |
| 32 | MALUKU UTARA        | 162                      | 780.000      | 126.360.000    |
| 33 | PAPUA               | 294                      | 780.000      | 229.320.000    |
| 34 | PAPUA BARAT         | 94                       | 780.000      | 73.320.000     |
| 35 | PAPUA TENGAH        | 258                      | 780.000      | 201.240.000    |
| 36 | PAPUA PEGUNUNGAN    | 184                      | 780.000      | 143.520.000    |
| 37 | PAPUA SELATAN       | 154                      | 780.000      | 120.120.000    |
| 38 | PAPUA BARAT DAYA    | 81                       | 780.000      | 63.180.000     |
|    | Total               | 35.000                   | 780.000      | 27.300.000.000 |

Rencana Distribusi BMHP Pot Dahak TA 2025

| No | Provinsi                  | Tahap 1 (Buah) | Tahap 2 (Buah) | Harga satuan | Total          |
|----|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1  | SUMATERA UTARA            | 356.697        | 356.691        | 2.500        | 1.783.470.000  |
| 2  | SUMATERA BARAT            | 103.660        | 103.660        | 2.500        | 518.300.000    |
| 3  | RIAU                      | 119.970        | 119.970        | 2.500        | 599.850.000    |
| 4  | JAMBI                     | 42.124         | 42.124         | 2.500        | 210.620.000    |
| 5  | SUMATERA SELATAN          | 228.830        | 228.830        | 2.500        | 1.144.150.000  |
| 6  | LAMPUNG                   | 78.400         | 78.400         | 2.500        | 392.000.000    |
| 7  | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 26.880         | 26.880         | 2.500        | 134.400.000    |
| 8  | KEPULAUAN RIAU            | 15.276         | 15.276         | 2.500        | 76.380.000     |
| 9  | DKI JAKARTA               | 276.976        | 276.976        | 2.500        | 1.384.880.000  |
| 10 | JAWA BARAT                | 1.900.198      | 1.900.198      | 2.500        | 9.500.990.000  |
| 11 | JAWA TENGAH               | 582.355        | 582.355        | 2.500        | 2.911.775.000  |
| 12 | DI YOGYAKARTA             | 17.475         | 17.475         | 2.500        | 87.375.000     |
| 13 | JAWA TIMUR                | 569.483        | 569.483        | 2.500        | 2.847.415.000  |
| 14 | BANTEN                    | 170.155        | 170.155        | 2.500        | 850.775.000    |
| 15 | BALI                      | 22.463         | 22.463         | 2.500        | 112.315.000    |
| 16 | NUSA TENGGARA BARAT       | 111.363        | 111.363        | 2.500        | 556.815.000    |
| 17 | NUSA TENGGARA TIMUR       | 36.393         | 36.393         | 2.500        | 181.965.000    |
| 18 | KALIMANTAN BARAT          | 95.555         | 95.555         | 2.500        | 477.775.000    |
| 19 | KALIMANTAN TENGAH         | 122.095        | 122.095        | 2.500        | 610.475.000    |
| 20 | KALIMANTAN SELATAN        | 57.083         | 57.083         | 2.500        | 285.415.000    |
| 21 | KALIMANTAN TIMUR          | 179.110        | 179.110        | 2.500        | 895.550.000    |
| 22 | KALIMANTAN UTARA          | 15.689         | 15.689         | 2.500        | 78.445.000     |
| 23 | SULAWESI UTARA            | 86.121         | 86.121         | 2.500        | 430.605.000    |
| 24 | SULAWESI TENGAH           | 90.529         | 90.529         | 2.500        | 452.645.000    |
| 25 | SULAWESI SELATAN          | 48.161         | 48.161         | 2.500        | 240.805.000    |
| 26 | GORONTALO                 | 45.086         | 45.086         | 2.500        | 225.430.000    |
| 27 | SULAWESI BARAT            | 34.585         | 34.585         | 2.500        | 172.925.000    |
| 28 | MALUKU                    | 35.504         | 35.504         | 2.500        | 177.520.000    |
| 29 | PAPUA BARAT               | 9.569          | 9.569          | 2.500        | 47.845.000     |
| 30 | PAPUA SELATAN             | 18.161         | 18.165         | 2.500        | 90.815.000     |
| 31 | PAPUA BARAT DAYA          | 4.060          | 4.060          | 2.500        | 20.300.000     |
|    |                           | -              | 298.940        | 2.500        | 747.350.000    |
|    | Total                     | 5.500.006      | 5.798.944      | 2.500        | 28.247.375.000 |

Rencana Distribusi BMHP TCM Kartid Ultra Expert TA 2025

| No               | Provinsi            | Total Alokasi | Harga Satuan | Total           |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1                | Aceh                | 3.100         | 195.000      | 604.500.000     |
| 2                | Bali                | 4.300         | 195.000      | 838.500.000     |
| 3                | Banten              | 28.450        | 195.000      | 5.547.750.000   |
| 4                | Bengkulu            | 11.000        | 195.000      | 2.145.000.000   |
| 5                | DKI Jakarta         | 166.200       | 195.000      | 32.409.000.000  |
| 6                | Jambi               | 10.200        | 195.000      | 1.989.000.000   |
| 7                | Jawa Barat          | 157.000       | 195.000      | 30.615.000.000  |
| 8                | Jawa Tengah         | 3.200         | 195.000      | 624.000.000     |
| 9                | Jawa Timur          | 4.200         | 195.000      | 819.000.000     |
| 10               | Kalimantan Barat    | 8.400         | 195.000      | 1.638.000.000   |
| 11               | Kalimantan Selatan  | 10.300        | 195.000      | 2.008.500.000   |
| 12               | Kalimantan Tengah   | 4.300         | 195.000      | 838.500.000     |
| 13               | Kepulauan Riau      | 1.900         | 195.000      | 370.500.000     |
| 14               | Lampung             | 20.600        | 195.000      | 4.017.000.000   |
| 15               | Maluku              | 9.800         | 195.000      | 1.911.000.000   |
| 16               | Maluku Utara        | 5.100         | 195.000      | 994.500.000     |
| 17               | Nusa Tenggara Timur | 12.400        | 195.000      | 2.418.000.000   |
| 18               | Papua               | 13.800        | 195.000      | 2.691.000.000   |
| 19               | Papua Barat Daya    | 1.100         | 195.000      | 214.500.000     |
| 20               | Papua Pegunungan    | 3.400         | 195.000      | 663.000.000     |
| 21               | Papua Selatan       | 8.200         | 195.000      | 1.599.000.000   |
| 22               | Riau                | 400           | 195.000      | 78.000.000      |
| 23               | Sulawesi Selatan    | 7.400         | 195.000      | 1.443.000.000   |
| 24               | Sulawesi Tengah     | 2.200         | 195.000      | 429.000.000     |
| 25               | Sulawesi Tenggara   | 7.100         | 195.000      | 1.384.500.000   |
| 26               | Sulawesi Utara      | 13.400        | 195.000      | 2.613.000.000   |
| 27               | Sumatera Selatan    | 21.700        | 195.000      | 4.231.500.000   |
| 28               | Sumatera Utara      | 33.100        | 195.000      | 6.454.500.000   |
| Total Distribusi |                     | 572.250       | 195.000      | 111.588.750.000 |
| Buffer Pusat     |                     | 65.100        | 195.000      | 12.694.500.000  |
| TOTAL            |                     | 637.350       | 195.000      | 124.283.250.000 |

Rencana Distribusi BMHP Reagen ZN TA 2025

| No | Provinsi                  | Rencana Distribusi (Kit) | Harga satuan | Total         |
|----|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1  | ACEH                      | 483                      | 179.000      | 86.457.000    |
| 2  | SUMATERA UTARA            | 1.922                    | 179.000      | 344.038.000   |
| 3  | SUMATERA BARAT            | 682                      | 179.000      | 122.078.000   |
| 4  | RIAU                      | 914                      | 179.000      | 163.606.000   |
| 5  | JAMBI                     | 540                      | 179.000      | 96.660.000    |
| 6  | SUMATERA SELATAN          | 948                      | 179.000      | 169.692.000   |
| 7  | BENGKULU                  | 132                      | 179.000      | 23.628.000    |
| 8  | LAMPUNG                   | 1.101                    | 179.000      | 197.079.000   |
| 9  | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 163                      | 179.000      | 29.177.000    |
| 10 | KEPULAUAN RIAU            | 209                      | 179.000      | 37.411.000    |
| 11 | DKI JAKARTA               | 1.465                    | 179.000      | 262.235.000   |
| 12 | JAWA BARAT                | 10.878                   | 179.000      | 1.947.162.000 |
| 13 | JAWA TENGAH               | 2.728                    | 179.000      | 488.312.000   |
| 14 | DI YOGYAKARTA             | 42                       | 179.000      | 7.518.000     |
| 15 | JAWA TIMUR                | 3.410                    | 179.000      | 610.390.000   |
| 16 | BANTEN                    | 477                      | 179.000      | 85.383.000    |
| 17 | BALI                      | 151                      | 179.000      | 27.029.000    |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT       | 933                      | 179.000      | 167.007.000   |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR       | 591                      | 179.000      | 105.789.000   |
| 20 | KALIMANTAN BARAT          | 305                      | 179.000      | 54.595.000    |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH         | 37                       | 179.000      | 6.623.000     |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN        | 654                      | 179.000      | 117.066.000   |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR          | 976                      | 179.000      | 174.704.000   |
| 24 | KALIMANTAN UTARA          | 74                       | 179.000      | 13.246.000    |
| 25 | SULAWESI UTARA            | 1.522                    | 179.000      | 272.438.000   |
| 26 | SULAWESI TENGAH           | 375                      | 179.000      | 67.125.000    |
| 27 | SULAWESI SELATAN          | 975                      | 179.000      | 174.525.000   |
| 28 | SULAWESI TENGGARA         | 1.404                    | 179.000      | 251.316.000   |
| 29 | GORONTALO                 | 106                      | 179.000      | 18.974.000    |
| 30 | SULAWESI BARAT            | 142                      | 179.000      | 25.418.000    |
| 31 | MALUKU                    | 465                      | 179.000      | 83.235.000    |
| 32 | MALUKU UTARA              | 236                      | 179.000      | 42.244.000    |
| 33 | PAPUA BARAT               | 22                       | 179.000      | 3.938.000     |
| 34 | PAPUA                     | 174                      | 179.000      | 31.146.000    |
| 35 | PAPUA SELATAN             | 252                      | 179.000      | 45.108.000    |
| 36 | PAPUA TENGAH              | 154                      | 179.000      | 27.566.000    |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN          | 184                      | 179.000      | 32.936.000    |
| 38 | PAPUA BARAT DAYA          | 174                      | 179.000      | 31.146.000    |
|    | BUFFER                    | 4.000                    | 179.000      | 716.000.000   |
|    | Total                     | 40.000                   | 179.000      | 7.160.000.000 |

Catatan harga satuan dan nilai barang sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam RKAKL.

**J. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah**

Dana dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku melalui mekanisme *reimburse*. *Reimburse* yang dilakukan melalui sistem aplikasi SITB. Jika dalam SITB, fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan telah menginput jumlah kasus yang diberikan layanan, maka petugas teknis di pusat akan melakukan verifikasi atas kasus yang telah dilayani tersebut. Jika hasil verifikasi disetujui, maka fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan tersebut akan dibayarkan melalui mekanisme transfer ke rekening yang telah disampaikan.

**K. Penyaluran Dana dan Barang Bantuan Pemerintah**

1. Melakukan seleksi penerima sesuai dengan kebutuhan.
2. Dilengkapi dokumen Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Penerima.
3. Pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan pemeriksaan barang sebelum didistribusikan.
5. Penyaluran barang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Berita Barang Keluar (SBBK) dan penyaluran melalui dinas kesehatan.
6. Penyaluran dana melalui mekanisme pengajuan klaim pembayaran atas pelaksanaan kegiatan bantuan operasional kegiatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan.

**L. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah**

1. Bantuan barang untuk mendukung Program Penanggulangan Penyakit dipertanggungjawabkan menggunakan mekanisme keuangan yang berlaku.
2. Penerima wajib menandatangani Surat Bukti Barang Keluar (SBBK).
3. Penerima wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
4. Barang tercatat sebagai BMN dan digunakan sesuai peruntukan.
5. Penerima melaporkan kondisi ketersediaan minimal setiap 6 (enam) bulan.
6. Penerima melaporkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi ke Direktorat Penyakit Menular melalui SITB dan/atau melalui surat resmi.



**M. Sanksi**

Penerima bantuan pemerintah bertanggung jawab penuh atas penggunaan barang bantuan. Apabila terjadi penyalahgunaan bantuan yang mengakibatkan kerugian negara, maka penerima bantuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**N. Penutup**

Petunjuk Teknis ini disusun untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran pelaksanaan bantuan pemerintah dalam bentuk barang/uang/jasa untuk program penanggulangan penyakit, khususnya dalam rangka penyediaan BMHP penanggulangan TBC.

Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam Petunjuk Teknis ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT,



MURTI UTAMI